



**RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BATU
TAHUN 2018 - 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, maka diharuskan kepada setiap instansi pemerintah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Batu dalam RPJMD Tahun 2018-2022 menetapkan VISI yaitu " DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA ". Visi Pemerintah Kota Batu tersebut dituangkan ke dalam 5 misi yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya local

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia

Misi 3 : Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis agrowisata

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan perdesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.

Badan Keuangan Daerah Kota Batu yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 dan menjalankan tugas serta fungsi sebagai penunjang keuangan merumuskan arah tujuan penyusunan rencana strategis berdasarkan MISI Ke-5. Adapun Tujuan dari misi ke-5 tersebut adalah "**Meningkatkan**

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan Batu Kota Berintegritas”.

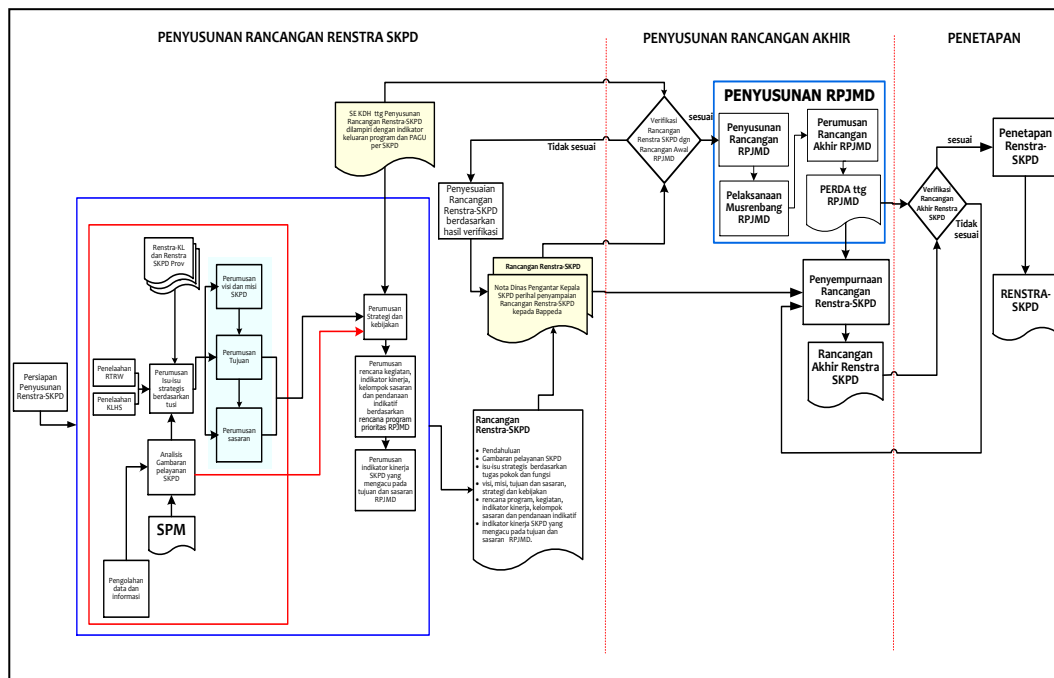
Diantara sasaran yang akan dicapai melalui misi tersebut adalah **“Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”**. Peran Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk merealisasikan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batu tersebut amat penting dan tidak bisa diabaikan yaitu sebagai SKPD yang berperan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Di sisi lain, setiap penyelenggara negara dan pemerintahan di semua level organisasi harus mampu menampilkan akuntabilitas kerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis serta diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Dengan demikian, maka setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu harus terintegrasi dengan program dan kegiatan Pemerintah Kota Batu secara keseluruhan dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah dicanangkan.

Upaya pengintegrasian perencanaan BKD di dalam sistem perencanaan Kota Batu secara menyeluruh memiliki konsekuensi bahwa BKD Kota Batu berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Strategis. Selain itu, kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Oleh karena itu, mendasari dan mengacu serta berpedoman pada visi, misi dan sasaran Pemerintah Kota Batu tersebut di atas, maka BKD menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang didahului dengan melakukan analisis terhadap lingkungan kerja (*environmental scanning*) untuk mengidentifikasi kondisi faktual yang mempengaruhi kinerja sampai dengan lima

tahun yang akan datang. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk pelaksanaan amanah RPJMD Kota Batu serta pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun mendatang, sehingga melalui Rencana Startegis yang baik, maka *roadmap* seluruh pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi terhadap program dan kegiatan dapat lebih mudah dilakukan. Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan Kota batu secara keseluruhan, maka Renstra BKD harus sinkron dengan perencanaan di atasnya.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rencana Strategis SKPD



Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Renstra Badan Keuangan Daerah 2018 – 2022 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2018 - 2022, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Renstra Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun fungsi dari rencana

strategis ini adalah untuk mengklarifikasi secara eksplisit visi dan misi kepala daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas satuan kerja perangkat daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Penyusunan rencana strategis ini disinergikan dengan perencanaan strategis yang telah disusun oleh instansi vertikal yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan organisasi perangkat daerah pengelola keuangan di Provinsi Jawa Timur dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan konsistensi penyusunan dokumen perencanaan antara pusat dan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Renstra BKD Kota Batu Tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu tahun 2005-2025.
 12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu;
 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor tahun, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu tahun 2018 - 2022.
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5/E);
 15. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis BKD Kota Batu Tahun 2018 - 2022 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan seluruh program dan kegiatan BKD Kota Batu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Maksud penyusunan Rencana Strategis BKD Kota Batu Tahun 2018 - 2022 adalah untuk menyediakan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan jangka menengah BKD Kota Batu selama 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Batu tahun 2018 – 2022 dan RPJPD 2005 – 2025.

Rencana Strategis BKD Kota Batu Tahun 2018 - 2022 memuat kondisi umum, visi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah kebijakan BKD Kota Batu dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu substansi materinya bersifat visioner di tingkatan SKPD dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi

keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka pendek (Rencana Kerja BKD) yang bersifat tahunan.

Maksud penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah 2018 - 2022 yang merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh jajaran organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan kebijakan pembangunan yang disepakati bersama yang tertuang di dalam RPJMD Kota Batu tahun 2018 - 2022.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Batu tahun 2018-2022 adalah:

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah dengan RPJMD Kota Batu.
2. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi sistem penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
3. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan daerah Kota Batu sesuai dengan kondisi, potensi dan prospek pengembangan yang berazaskan prinsip efisien, efektif, ekonomis, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Batu disesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII

PENUTUP

BAB II

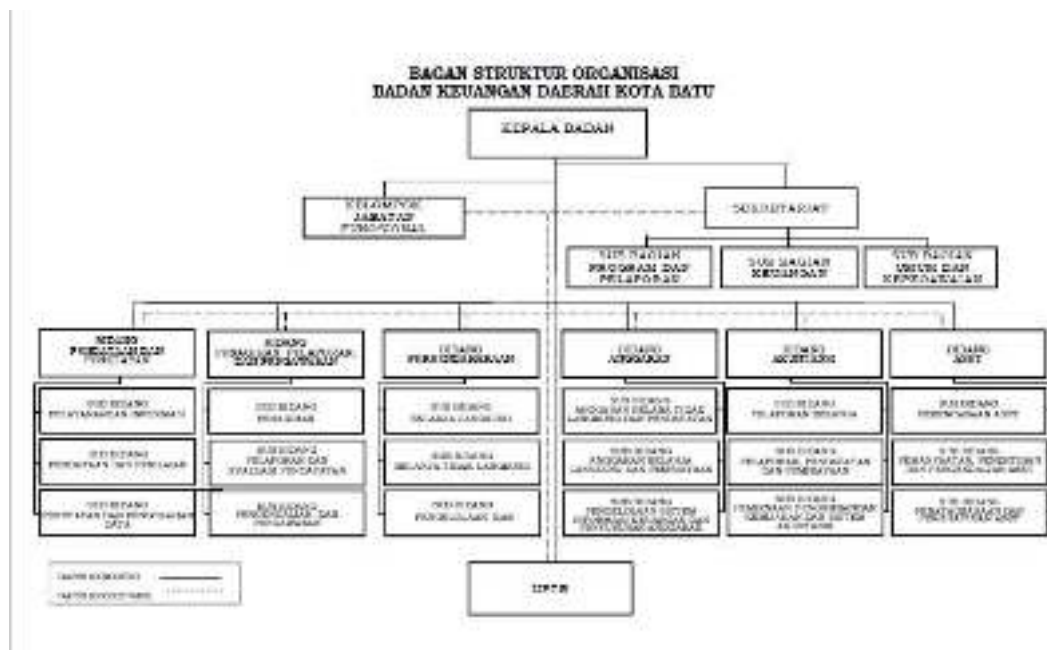
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Batu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan daerah tersebut Badan Keuangan Daerah Kota Batu dibentuk dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Keuangan Daerah berpedoman pada Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah



Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan

maupun dengan lembaga teknis lainnya, dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Badan Keuangan Daerah Kota Batu terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat,
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan,
- d. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan
- e. Bidang Perbendaharaan,
- f. Bidang Anggaran,
- g. Bidang Akuntansi,
- h. Bidang Aset,
- i. UPT Badan; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi :

- a. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi;
- b. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
- c. Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pajak daerah. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan membawahi:

- a. Sub Bidang Penagihan;
- b. Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah. Bidang Anggarn membawahi:

- a. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pendapatan;
- b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan; dan
- c. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan dan Penyusunan Anggaran.

Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan Pengelola, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta TP-TGR. Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Belanja Langsung;
- b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
- c. Sub Bidang Pengelolaan Kas.

Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selai kas, rekonsiliasi realisasi APBD, sebagai entitas akuntansi dan antitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang Akuntansi membawahi:

- a. Sub Bidang Pelaporan Belanja;
- b. Sub Bidang Pelaporan, Pendapatan, dan Pembiayaan; dan
- c. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan dan Sistem Akuntansi.

Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, investasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, serta pengendalian aset. Bidang Aset membawahi:

- a. Sub Bidang Perencanaan Aset;
- b. Sub Bidang Pemanfaatan, Penertiban, dan Pengendalian Aset; dan
- c. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Keuangan Daerah perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas adalah sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah

| NO | PEGAWAI | JUMLAH | % |
|--------|---------|--------|--------|
| 1 | PNS | 118 | 85,51% |
| 2 | CPNS | 0 | 0 |
| 3 | NON PNS | 20 | 14,49% |
| JUMLAH | | 138 | 100% |

Jumlah pegawai Badan Keuangan Daerah terdiri dari 138 daerah yang terdiri dari 118 orang atau 85,51% PNS dan 20 orang Non PNS atau 14,49%.

Susunan Pegawai Badan Keuangan Daerah Berdasarkan Golongan

| NO | GOLONGAN | JUMLAH | |
|--------|--------------|--------|------|
| | | PNS | CPNS |
| 1 | GOLONGAN IV | 3 | 0 |
| 2 | GOLONGAN III | 62 | 0 |
| 3 | GOLONGAN II | 53 | 0 |
| 4 | GOLONGAN I | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 118 | 0 |

Berdasarkan Jumlah pangkat dan golongan, Badan Keuangan Daerah mempunyai kapasitas SDM yang cukup memadai yaitu dari 118 PNS, yang menduduki pangkat golongan IV sejumlah 3 orang, golongan III sejumlah 62 orang, dan golongan II sejumlah 53 orang.

**Susunan Pegawai Badan Keuangan Daerah
Berdasarkan Jabatan Struktural**

| NO | ESELON | JUMLAH |
|----|------------|--------|
| 1 | ESELON II | 1 |
| 2 | ESELON III | 7 |
| 3 | ESELON IV | 23 |
| | JUMLAH | 31 |

Ditinjau dari struktur organisasinya, pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu memiliki 1 pejabat struktural eselon II, 7 orang eselon III dan 23 orang eselon IV.

2. Sarana dan Prasarana (aset)

Adapun sarana prasarana/aset yang dimiliki Badan Keuangan Daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan adalah sebagai berikut:

Tabel
Daftar Inventarisasi Aset

| JENIS ASET | JUMLAH (Rp.) |
|-----------------------------|------------------------|
| Tanah | 102.246.719.349 |
| Peralatan dan Mesin | 39.664.799.527 |
| Gedung dan Bangunan | 38.233.595.362 |
| Jalan, jaringan dan irigasi | 55.148.331 |
| Aset Tetap lainnya | 26.162.793 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | |
| TOTAL | 180.226.425.362 |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja.

Dimana aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah.

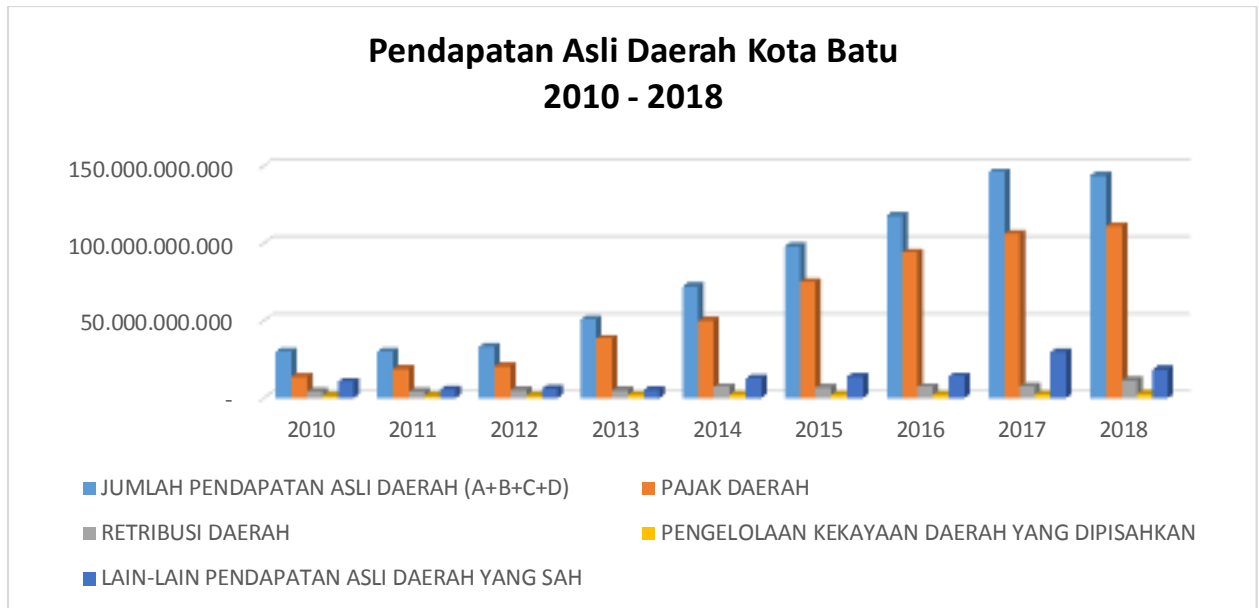
Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa dari sisi pendapatan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan/kenaikan yang sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sekitar 10,90%.

**Kinerja Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batu
 Tahun 2009 s/d 2016**

| URAIAN | TAHUN | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 17.386.741.568,44 | 17.735.602.953,95 | 30.241.864.301,14 | 38.794.059.670,00 | 80.493.920.959,00 | 104.233.584.925,34 | 109.335.330.020,16 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 7.861.348.123,00 | 9.529.225.958,00 | 19.404.220.619,00 | 28.187.860.661,00 | 62.807.445.882,00 | 83.692.699.934,00 | 88.573.005.670,00 |
| Pajak Hotel | 2.071.255.439,00 | 2.674.675.976,00 | 3.365.076.772,00 | 5.244.491.392,00 | 14.390.391.081,00 | 16.533.613.716,00 | 17.944.383.056,00 |
| Pajak Restoran | 392.560.215,00 | 535.866.990,00 | 1.268.660.956,00 | 1.697.168.121,00 | 3.994.449.379,00 | 5.874.199.585,00 | 7.439.408.612,00 |
| Pajak Hiburan | 1.978.360.490,00 | 2.766.190.750,00 | 3.751.062.526,00 | 3.402.281.809,00 | 6.019.223.859,00 | 7.669.602.854,00 | 10.023.704.360,00 |
| Pajak Reklame | 419.396.604,00 | 465.643.756,00 | 594.919.662,00 | 606.574.334,00 | 504.821.136,00 | 470.671.373,00 | 1.592.985.203,00 |
| Pajak Penerangan Jalan | 2.802.325.375,00 | 2.873.808.486,00 | 3.682.506.792,00 | 5.521.137.467,00 | 8.577.158.978,00 | 9.702.985.905,00 | 10.417.809.198,00 |
| Pajak Parkir | 197.450.000,00 | 213.040.000,00 | 379.455.850,00 | 514.102.457,00 | 835.458.838,00 | 917.778.602,00 | 1.140.417.722,00 |
| Pajak Air Bawah Tanah | | | 500.652.185,00 | 689.989.879,00 | 697.703.981,00 | 716.003.984,00 | 1.425.148.171,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | | | | | 10.245.426.431,00 | 11.284.043.302,00 | 18.016.708.373,00 |
| Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | 5.861.885.876,00 | 10.512.115.202,00 | 17.542.812.199,00 | 30.523.800.613,00 | 20.572.440.975,00 |
| Hasil Retribusi Daerah | 3.087.977.630,00 | 3.478.065.774,00 | 4.048.972.418,00 | 4.925.276.704,00 | 4.480.985.852,10 | 5.209.867.148,00 | 5.846.996.775,00 |
| Retribusi Jasa Umum | 1.559.067.000,00 | 1.802.926.688,00 | 1.933.887.418,00 | 2.486.582.174,00 | 2.466.319.950,10 | 2.388.840.775,00 | 2.722.147.275,00 |
| Retribusi Jasa Usaha | 392.699.200,00 | 472.676.786,00 | 474.404.500,00 | 619.654.830,00 | 358.342.602,00 | 717.787.573,00 | 679.840.000,00 |
| Retribusi Perizinan Tertentu | 1.136.211.430,00 | 1.202.462.300,00 | 1.640.680.500,00 | 1.819.039.700,00 | 1.656.323.300,00 | 2.103.238.800,00 | 2.445.009.500,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 876.068.906,11 | 924.903.592,24 | 1.543.221.141,00 | 1.690.951.280,48 | 2.189.729.441,01 | 2.177.429.333,26 | 2.152.462.133,00 |
| Bagian Laba Atas penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah BUMN | 876.068.906,11 | 924.903.592,24 | 1.543.221.141,00 | 1.690.951.280,48 | 2.189.729.441,01 | 2.177.429.333,26 | 2.152.462.133,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 5.561.346.909,33 | 3.803.407.629,71 | 5.245.450.122,55 | 3.989.971.024,90 | 11.015.759.784,52 | 13.153.588.510,08 | 12.762.865.442,16 |
| Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | | | | 114.750.000,00 | | | |
| Penerimaan Jasa Giro | 2.560.766.108,15 | 2.473.633.390,31 | 2.303.600.681,40 | 2.907.681.390,55 | 6.258.529.493,34 | 7.396.584.958,00 | 4.702.116.469,20 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | | | 63.900.000,00 | 8.150.000,00 | 1.325.000,00 | 27.521.000,00 | 9.792.000,00 |
| Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 260.672.772,43 | 214.034.861,28 | 489.949.786,03 | 240.107.564,35 | 98.448.588,00 | 225.791.502,26 | 1.161.620.037,03 |
| Pendapatan Denda Pajak | | | 14.341.778,00 | 14.982.090,00 | 374.137.056,00 | 513.357.758,00 | 529.436.804,72 |
| Pendapatan Dari Pengembalian | 2.086.840.577,92 | 584.449.072,85 | 672.633.315,72 | 281.769.012,00 | 2.382.013,04 | | |
| Pendapatan Lain-lain | 653.067.450,83 | 531.290.305,27 | 1.701.024.561,40 | 422.530.968,00 | 1.948.005.634,14 | | |
| Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | | 2.332.932.000,00 | | |
| Pendapatan Denda Retribusi | | | | | | | 2.837.800,00 |

Sumber: Badan Keuangan, Daerah Kota Batu

Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Batu
Tahun 2010-2018



Pendapatan Asli Daerah Kota Batu berasal dari beberapa sumber pendapatan meliputi:

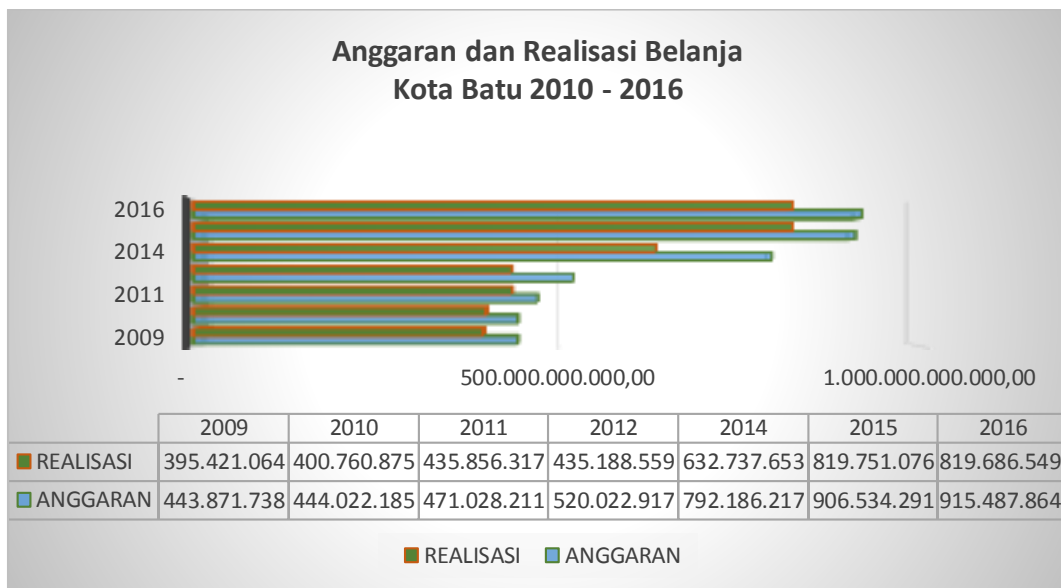
- a. Pendapatan Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah Kota Batu, PAD didominasi dari pendapatan pajak daerah. Adapun sumber pendapatan pajak daerah Kota Batu adalah:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Bawah Tanah
- h. Pajak Bumi dan Bangunan
- i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan pendapatan selanjutnya dialokasikan sebagai belanja untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Tentunya setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan.

Gambar
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Batu
Tahun 2010 - 2016



Grafik diatas menunjukkan gambaran Belanja Daerah Kota Batu tahun 2009-2016 dimana rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun sekitar 10,3 persen. Adapun komposisi belanja langsung dan tidak langsung APBD 2009 – 2017 adalah seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tabel
Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kota Batu
Tahun 2009 – 2017

| TAHUN | Belanja tidak langsung | Belanja Langsung | TOTAL BELANJA | % Belanja Langsung terhadap Belanja APBD |
|-------|------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 2009 | 185.320.681.396,60 | 258.551.057.370,00 | 443.871.738.766,60 | 58,25 |
| 2010 | 236.244.764.906,00 | 207.777.420.377,00 | 444.022.185.283,00 | 46,79 |
| 2011 | 242.513.111.774,81 | 228.515.099.720,00 | 471.028.211.494,81 | 48,51 |
| 2012 | 290.683.441.517,00 | 229.339.476.247,00 | 520.022.917.764,00 | 44,10 |
| 2013 | 324.721.310.330,42 | 345.836.472.440,89 | 670.557.782.771,31 | 51,57 |
| 2014 | 370.400.615.054,37 | 421.785.602.459,00 | 792.186.217.513,37 | 53,24 |
| 2015 | 394.195.774.553,85 | 512.338.513.358,30 | 906.534.287.912,15 | 56,52 |
| 2016 | 446.996.538.597,28 | 468.491.325.753,88 | 915.487.864.351,16 | 51,17 |
| 2017 | 432.488.127.325,49 | 495.719.103.742,00 | 928.207.231.067,49 | 53,41 |

Pengeluaran atau belanja pemerintah daerah kabupaten kota untuk keperluan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dibiayai melalui APBD. Belanja menurut kelompok belanja dalam Permendagri 59 Tahun 2007 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Jenis belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Dari tabel tersebut tampak bahwa Pemerintah Kota Batu dari tahun ke tahun berusaha untuk terus meningkatkan rasio belanja langsung terhadap total belanja APBS, karena melalui belanja langsung ini kinerja program kegiatan suatu daerah dapat diukur.

Tabel TC.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Kota Batu

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Opini BPK | | | | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sedangkan ditinjau dari pencapaian kinerja pelayanan, Badan Keuangan Daerah Kota Batu menunjukkan tren positif. Mulai tahun 2013 – 2014 Kota Batu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan 3 tahun berturut-turut yaitu 2015 sampai dengan 2017 Kota Batu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD. Sehingga pada 5 (lima) tahun terakhir, kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Batu tercapai 100%.

Tabel T-C.23
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Batu

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|------------------------|------|------|------|--------------------------|----------------------------------|------|------|------|--------------------------|--|------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 22.509.021.400,00 | | | | | 20.923.704.572,00 | | | | | 92,96 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.499.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.905.800,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,93 | N/A | N/A |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.975.000.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.451.820.525,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 82,41 | N/A | N/A |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.266.369.200,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.955.101.044,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,96 | N/A | N/A |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.109.118.200,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.817.665.866,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,18 | N/A | N/A |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.380.000.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.261.405.110,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,41 | N/A | N/A |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | N/A | N/A | N/A | N/A | 180.000.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97.272.265,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 54,04 | N/A | N/A |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | N/A | N/A | N/A | N/A | 286.304.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.836.550,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,41 | N/A | N/A |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.200.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.200.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,00 | N/A | N/A |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.556.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.094.290,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,07 | N/A | N/A |
| Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 207.950.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 199.403.122,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,89 | N/A | N/A |
| Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.025.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.000.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,95 | N/A | N/A |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | 29.891.225.530,00 | | | | | 21.693.735.127,00 | | | | | 72,58 | | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.797.234.450,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.457.591.250,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,72 | N/A | N/A |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.734.341.720,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.825.079.653,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 62,39 | N/A | N/A |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.748.685.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 759.685.345,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,44 | N/A | N/A |
| Pengadaan Mebeleur | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.780.000.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.621.887.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,38 | N/A | N/A |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.544.946.360,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.277.227.762,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,19 | N/A | N/A |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.731.410.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.164.808.392,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 79,26 | N/A | N/A |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.150.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80.643.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,83 | N/A | N/A |
| Pelayanan Operasional Gedung Perkantoran Terpadu | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.470.458.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 506.812.725,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,47 | N/A | N/A |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | 1.689.900.000,00 | | | | | 5.910.000,00 | | | | | 0,35 | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.689.900.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.910.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,35 | N/A | N/A |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 277.500.000,00 | | | | | 230.290.000,00 | | | | | 82,99 | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | N/A | N/A | N/A | N/A | 277.500.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 230.290.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 82,99 | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | N/A | N/A | N/A | N/A | 451.765.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 274.403.659,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,74 | N/A | N/A |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester SKPKD | N/A | N/A | N/A | N/A | 122.895.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 70.460.600,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 57,33 | N/A | N/A |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD | N/A | N/A | N/A | N/A | 121.490.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 66.060.266,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 54,38 | N/A | N/A |
| Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan | N/A | N/A | N/A | N/A | 125.080.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 113.037.793,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90,37 | N/A | N/A |
| Penyusunan Saldo Awal Berbasis Akrua SKPD dan SKPKD | N/A | N/A | N/A | N/A | 68.050.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.845.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,51 | N/A | N/A |
| Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.250.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.672.205.500,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.423.827.526,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 70,69 | N/A | N/A |
| Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD | N/A | N/A | N/A | N/A | 538.275.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 423.648.800,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,70 | N/A | N/A |
| Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD | N/A | N/A | N/A | N/A | 294.530.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 130.683.562,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,37 | N/A | N/A |
| Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD | N/A | N/A | N/A | N/A | 256.150.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 220.306.150,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,01 | N/A | N/A |
| Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD | N/A | N/A | N/A | N/A | 156.642.500,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 91.213.647,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 58,23 | N/A | N/A |
| Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | N/A | N/A | N/A | N/A | 108.660.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 82.441.375,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,87 | N/A | N/A |
| Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.000.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 48.193.200,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,39 | N/A | N/A |
| Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.371.100.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 929.473.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 67,79 | N/A | N/A |
| Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 233.825.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95.089.274,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,67 | N/A | N/A |
| Penyelesaian Aset/Barang Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 527.750.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 226.337.507,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,89 | N/A | N/A |
| Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.216.750.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.110.434.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,26 | N/A | N/A |
| Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 95.700.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 87.000.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90,91 | N/A | N/A |
| Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 195.750.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 109.557.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 55,97 | N/A | N/A |
| Penerbitan dan Pengamanan Aset | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.237.275.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 993.597.219,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,31 | N/A | N/A |
| Penyelesaian Piutang PAD | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A |
| Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 70.975.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.904.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,18 | N/A | N/A |
| Verifikasi Data Pajak Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 137.803.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 98.199.019,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,26 | N/A | N/A |
| Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 54.250.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.226.400,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 92,58 | N/A | N/A |
| Pemutakhiran NJOP PBB | N/A | N/A | N/A | N/A | 271.400.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.320.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9,70 | N/A | N/A |
| Peningkatan Kepatuhan Perpajakan | N/A | N/A | N/A | N/A | 61.575.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 54.226.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,06 | N/A | N/A |
| Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 129.400.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96.983.300,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 74,95 | N/A | N/A |
| Cetak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB P2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 214.840.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 186.661.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,88 | N/A | N/A |
| Penunjang Administrasi dan Penatausahaan Keuangan | N/A | N/A | N/A | N/A | 250.520.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 221.212.573,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,30 | N/A | N/A |
| Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 45.500.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.103.500,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 83,74 | N/A | N/A |
| Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah (PAD) | N/A | N/A | N/A | N/A | 153.535.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 91.017.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,28 | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | N/A | N/A | N/A | N/A | 506.934.500,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 92.132.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,17 | N/A | N/A |
| Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 122.000.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 47.287.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,76 | N/A | N/A |
| Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 384.934.500,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44.845.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11,65 | N/A | N/A |
| Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.000.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 94.320.750,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,32 | N/A | N/A |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.000.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 94.320.750,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,32 | N/A | N/A |
| Penyediaan Aplikasi Sistem Counter Antrian Pelayanan | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A |

Badan Keuangan Daerah Kota Batu terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016. Sehingga pelaksanaan program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Batu mulai dilaksanakan pada tahun 2017. Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa banyak program dengan realisasi anggaran masih di bawah 80%. Namun demikian secara kinerja pelayanan, kinerjanya dapat mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penganggaran program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah masih perlu dikaji dan dicermati, baik dari sisi ketepatan jumlah anggaran maupun tata waktu pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah menyelaraskan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku instansi vertikal dan disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Batu selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tantangan :

1. Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relative rendah
2. Identifikasi, mengkaji, monitoring, potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah
3. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan
4. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel
5. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan
6. Masih adanya aset SKPD yang belum dioptimalkan
7. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset
8. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset
9. Tuntutan transparansi informasi public menuju good government

Peluang :

1. Lokasi pelayanan pajak dan retribusi yang strategis, online, dan mudah diakses oleh masyarakat
2. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia.
3. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel.
4. Pengembangan BUMD menjadi lokomotif perekonomian di Kota Batu dan menjadi sumber pendapatan asli daerah

5. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan.
6. Adanya website sebagai media informasi public
7. Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi terhadap penggunaan barang milik daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah dapat dikembangkan dan ditingkatkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan Daerah Kota Batu masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Batu, maka peranan BKD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal dan eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensi dapat dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap Badan Keuangan Daerah Kota Batu antara lain:

1. Adanya pemberlakuan transaksi non tunai sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah memberlakukan transaksi Non Tunai paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga

mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan / kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan.

3. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai aset daerah yang kurang optimal pemanfaatan dan pemeliharaannya sehingga aset menjadi tidak terawat atau rusak. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi public yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi computer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sebagaimana tertuang

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022. Bahwa visi pembangunan Kota Batu “ **Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing, dan Sejahtera**”.

Misi merupakan urusan umum yang memuat tentang suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kota Batu. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kota Batu menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya local.
2. Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional

Dari misi tersebut Badan Keuangan Daerah masuk dalam misi 5 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.”** Dengan tujuan **“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan Batu Kota Berintegritas”**

Sesuai dengan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai unsur perangkat daerah penunjang di bidang keuangan, kinerja BKD diarahkan pada pemenuhan sasaran Pemerintah Kota Batu yaitu dalam rangka menunjang indeks reformasi Birokrasi yang salah satunya diukur dari hasil opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Rencana strategis Kementerian Keuangan 2015 – 2019 adalah “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”. Untuk menjalankan visi tersebut, salah satu misi yang diambil adalah mencapai tingkat kepatuhan pajak melalui pelayanan prima dan memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan kementerian keuangan diantaranya adalah peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah. Sasaran dari tujuan tersebut adalah perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas.

Sejalan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, Pemerintah Kota Batu mulai tahun 2017 memfokuskan pelaksanaan program pada integrasi siste informasi keuangan daerah dengan titik berat pada integrasi perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2017 telah dibangun sistem e-budgeting sebagai cikal bakal integrasi sistem perencanaan dan penganggaran. Muara dari pelaksaaan program tersebut yaitu dalam rangka mempertahankan opini BPK wajar tanpa pengecualian sesuai dengan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Batu dalam misi ke-5 dan sekaligus sebagai indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah.

Penyunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah juga diarahkan untuk selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Prov Jawa Timur dan Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan dari BPKAD Prov Jawa Timur adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal” dengan indikator tujuan Opini BPK dan sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari perangkat daerah pengelola keuangan dan aset adalah diukur dari hasil penilaian BPK atas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kejelasan dan kewajaran penyusunan laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, BKD Kota Batu juga berusaha untuk meraih tujuan akhir dari pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui target predikat tertinggi opini BPK atas laporan keuangan.

Sedangkan Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur merumuskan tujuan “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan publik” dengan sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan kualitas pelayanan publik dan IKU persentase kenaikan penerimaan PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan pembangunan selain dana transfer dari pusat. Oleh sebab itu daerah berusaha untuk terus meningkatkan PAD dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian daerah. Karena semakin besar rasio kemandirian maka semakin kuat struktur pendanaan di suatu daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tema dan isu0isu pembangunan berkelanjutan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Batu 208 – 2022 ditekankan dari Visi RPJMD pada 5 tahun mendatang yaitu memiliki fokus pada keberdayaan desa, sehingga terwujudnya Kota Batu sebagai sentra agro wisata internasional, yang memiliki karakter, daya saing dan sejahtera. Sedangkan 5 Misi RPJMD tersebut, diklasifikasikan menjadi 4, yaitu:

1. Pembangunan kehidupan sosial (misi 1) Pdan Pembangunan Tata Kelola (misi 5)
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (Misi 2)
3. Pembangunan Perekonomian (Misi 3)
4. Pembangunan Infrastruktur (Misi 4).

Berdasarkan identifikasi visi dan misi RPJMD Kota Batu kemudian diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan global SDG’s yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) concern sehingga dapat disusun tema besar isu-isu pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kota Batu, yaitu:

1. Stabilitas sosial dan politik
2. Kemiskinan
3. Pembangunan SDM
4. Pertanian

5. Ketahanan Pangan
6. Kewirausahaan dan Usaha Kecil
7. Pariwisata
8. Kawasan Perkotaan dan Pemukiman
9. Manajemen Sumber Daya Air
10. Green Investment
11. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup
12. Manajemen Bencana

Dari perumusan isu-isu strategis tersebut di atas, Badan Keuangan Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang, tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan Program prioritas kajian kebijakan, rencana dan/atau program (K/R/P) terpilih. Namun demikian Badan Keuangan Daerah sebagai SKPD dan SKPKD turut mendukung dalam pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program prioritas penyelesaian isu strategis KLHS Kota Batu 2018 – 2022.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, maka peranan Badan Keuangan Daerah sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengelolaan aset daerah. Peranan tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah, antara lain:

1. Adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung gerakan transaksi non tunai dalam melakukan transaksi keuangan menuntut adanya perubahan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

2. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran perlu adanya pemantapan sistem informasi terintegrasi guna mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan e-planning dan e-budgetting.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan upaya melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif untuk menjembatani visi dan misi kepala daerah menuju program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu. Tanpa adanya tujuan dan sasaran, visi dan misi kepala daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Batu akan sangat sulit dioperasionalkan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran ini merupakan dampak yang diharapkan terwujud sebagai bentuk keberhasilan pembangunan daerah. Yang dimaksud tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Penetapan Rumusan Tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah sesuai dengan rumusan tujuan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu. Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah: **"Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel."**

Sasaran strategis yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah.
2. Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan

dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan Daerah

| NO. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|--|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel | | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah | Persentase OPD yang menyusun Laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu | 80% | 90% | 95% | 98% | 98% |
| | | Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah | Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana terantum dalam RPJMD Kota Batu 2018 – 2022. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah kota Batu dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan strategi dan kebijakan operasional sesuai dengan ketentuan atau regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan factor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan lingkungan yang ada, untuk lima tahun kedepan Badan Keuangan Daerah menetapkan strategi antara lain:

- 1) Menjalin kerjasama dan kemitraan Masyarakat, Swasta dan Pemerintah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli daerah
- 2) menerapkan, dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan aset serta proses bisnis/tatalaksana secara berkelanjutan dengan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi
- 3) Peningkatan kualitas dan profesionalisme personil Badan Keuangan Daerah sebagai penunjang pelayanan prima

Rumusan strategi merupakan pernyataan penjelas bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi kedalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan konkret bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

Adapun untuk melaksanakan strategi tersebut diperlukan adanya kebijakan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi. Kebijakan Badan Keuangan Daerah antara lain:

1. Optimalisasi penerimaan daerah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
2. Mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola sistem perekaman data dan informasi yang valid dan terbaru yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
3. Mengembangkan Potensi Kemampuan Personil sesuai bidang dan Tanggung Jawabnya serta penerapan Reward and Punishment terhadap Prestasi Kerja yang terukur

Untuk mempermudah pemahaman serta mengevaluasi keterkaitan dan sinkronisasi terhadap RPJMD Kota Batu Tahun 2018 - 2022, maka Tabel berikut menyajikan *roadmap* Rencana Strategis BKD Kota Batu Tahun 2018 – 2022 yang meringkas rumusan hasil pemikiran dan uraian di atas.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Keuangan Daerah

| | | | |
|---|--|--|---|
| VISI | Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing, dan Sejahtera | | |
| MISI 5 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional. | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel | Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah | menerapkan, dan memperbaiki sistem pengeloaan keuangan dan aset serta proses bisnis/tatalaksana secara berkelanjutan dengan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi | Mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola sistem perekaman data dan informasi yang valid dan terbaru yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel |
| | Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah | Menjalin kerjasama dan kemitraan Masyarakat, Swasta dan Pemerintah dalam rangka optimalisasi pajak daerah | Optimalisasi penerimaan daerah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditentukan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2018 – 2022.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

Program Tahun 2018 :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Tahun 2019 - 2022

1. Program Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah
2. Program Penyusunan APBD dan Perubahan APBD
3. Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
6. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah

Adapun program pendukung yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah adalah :

Program Tahun 2018 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Tahun 2019 – 2022 :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|--|------|--|---|---|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------|----|---|--------|
| | | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel | | | | Opini BPK | WTP | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | Badan Keuangan Daerah | |
| | Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah | | | Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan dengan benar dan tepat waktu | 70% | 80% | | 90% | | 95% | | 98% | | 98% | | 98% | | | |
| | | | Program Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase SKPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja dengan benar dan sesuai SAP | 70% | 80% | | 90% | | 95% | | 98% | | 98% | | 98% | | | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD | Jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan semesteran tepat waktu | 33 | 35 | 104.244.000 | | | | | | | | | | | Bidang Akuntansi | |
| | | | Penyusunan Saldo Awal Berbasis Akrual SKPD dan SKPKD | Jumlah Laporan saldo awal SKPD dan SKPKD | 1 | 1 | 51.213.400 | | | | | | | | | | | Bidang Akuntansi | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun SKPKD | Jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan akhir tahun tepat waktu | 28 | 32 | 110.657.000 | 36 | 288.034.700 | 38 | 320.768.200 | 39 | 340.365.000 | 39 | 361.901.500 | 39 | | Bidang Akuntansi | |
| | | | Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan | Jumlah SKPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja tanpa koreksi sesuai BA hasil rekonsiliasi | 33 | 35 | 103.805.000 | 35 | 114.200.000 | 36 | 125.600.000 | 36 | 113.000.000 | 37 | 101.700.000 | 37 | | Bidang Akuntansi | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang dipedomani | 1 | 1 | 151.227.000 | | | | | | | | | | | Bidang Akuntansi | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Perwali Pertanggungjawaban APBD yang dipedomani | 1 | 1 | 39.480.000 | | | | | | | | | | | Bidang Akuntansi | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perwali Penjabaran Pertanggungjawaban APBD | Jumlah perda dan perwali pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu | 2 | | | 2 | 209.777.700 | 2 | 230.755.400 | 2 | 253.830.900 | 2 | 279.214.000 | 2 | | Bidang Akuntansi | |
| | | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun | 0 | 1 | 173.672.000 | 1 | 191.039.200 | 3 | 210.143.120 | 1 | 174.500.000 | 1 | 174.500.000 | 7 | | Bidang Akuntansi | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|--------|---------|------|--|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|----|---|-----------------|--|
| | | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Target | Rp | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | Program Penyusunan APBD dan Perubahan APBD | Penetapan APBD | tepat waktu | tepat waktu | | tepat waktu | | tepat waktu | | tepat waktu | | tepat waktu | | tepat waktu | | | Bidang Anggaran | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD | Jumlah Perda APBD yang disusun tepat waktu | 1 | 1 | 608.806.600 | | | | | | | | | | | | Bidang Anggaran | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD | Jumlah Perwali Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu | 1 | 1 | 239.700.000 | | | | | | | | | | | | Bidang Anggaran | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Jumlah Perda dan Perwali APBD yang disusun tepat waktu | | | | 2 | 833.200.000 | 2 | 845.000.000 | 2 | 855.000.000 | 2 | 865.000.000 | 2 | | Bidang Anggaran | | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD | Jumlah Perda P-APBD yang disusun tepat waktu | 1 | 1 | 655.595.000 | | | | | | | | | | | | Bidang Anggaran | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Perwali Penjabaran P-APBD yang disusun tepat waktu | 1 | 1 | 227.781.020 | | | | | | | | | | | | Bidang Anggaran | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran P-APBD | Jumlah Perda dan Perwali P-APBD yang disusun tepat waktu | | | | 2 | 833.200.000 | 2 | 845.000.000 | 2 | 855.000.000 | 2 | 865.000.000 | 2 | | Bidang Anggaran | | |
| | | | Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi Teknologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah sistem informasi yang terintegrasi | 3 | 3 | 219.393.300 | 3 | 271.332.000 | 4 | 295.465.000 | 4 | 332.011.000 | 4 | 351.200.000 | 4 | | Bidang Anggaran | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|--------|---------|------|--|---|---|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------|----|---|-----------------------|--|
| | | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Target | Rp | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah | Ketepatan waktu penyampaian laporan penatausahaan keuangan | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | Bidang Perbendaharaan | |
| | | | Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan | % realisasi belanja yang sesuai dengan anggaran kas | | 70% | 292.451.500 | 80% | 321.696.650 | 90% | 353.866.000 | 95% | 389.252.600 | 95% | 418.177.000 | 95% | | | Bidang Perbendaharaan | |
| | | | Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas | Jumlah dokumen PPKD yang disiapkan | 11.000 dok | 10.000 | 17.417.050 | 10.000 | 19.100.000 | 10.000 | 21.010.000 | 10.000 | 23.111.000 | 10.000 | 25.422.100 | 10.000 | | | Bidang Perbendaharaan | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah SKPD yang melakukan penatausahaan belanja dengan benar sesuai BA rekonsiliasi penatausahaan keuangan | | 70% | 151.372.200 | | | | | | | | | | | | Bidang Perbendaharaan | |
| | | | Penatausahaan keuangan PPKD | Tertib administrasi realisasi belanja hibah dan bansos | | | | 100% | 95.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 107.000.000 | 100% | 115.000.000 | 100% | | | Bidang Perbendaharaan | |
| | | | Pengendalian penatausahaan pelaksanaan anggaran | Jumlah SKPD yang melakukan penatausahaan belanja dengan benar sesuai BA rekonsiliasi penatausahaan keuangan | | | | 75% | 130.000.000 | 80% | 140.000.000 | 85% | 150.000.000 | 90% | 160.000.000 | 90% | | | | |
| | | | Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah | Tingkat pemahaman peserta terhadap peraturan pengelolaan keuangan dan penatausahaan | N/A | | | 75% | 250.000.000 | 80% | 250.000.000 | 85% | 250.000.000 | 85% | 275.000.000 | 85% | | | | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Gaji PNS | Validasi Data Gaji PNS | | | | 80% | 100.000.000 | 80% | 110.000.000 | 90% | 115.000.000 | 90% | 120.000.000 | 90% | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|--|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------|----|---|--------|--|-------------|
| | | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Target | Rp | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase SKPD yang menyusun neraca aset dengan benar dan tepat waktu | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | Jumlah SKPD dengan KIB valid sesuai BA rekonsiliasi aset | 28 | 32 | 1.365.452.500 | 36 | 1.400.900.000 | 37 | 1.540.990.000 | 39 | 1.695.089.000 | 39 | 1.864.597.900 | 39 | | | | | Bidang Aset |
| | | | Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah | Jumlah sistem informasi pengelolaan aset | 1 | 2 | 430.218.500 | 2 | 473.240.350 | 2 | 520.564.385 | 2 | 572.620.824 | 2 | 629.882.906 | 2 | | | | | Bidang Aset |
| | | | Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah | % kasus TP-TGR yang ditindaklanjuti | | 80% | 76.840.000 | 80% | 84.524.000 | 90% | 92.976.400 | 90% | 102.274.040 | 100% | 112.501.444 | 100% | | | | | Bidang Aset |
| | | | Penertiban dan Pengamanan Aset | Jumlah penyelesaian kasus sengketa aset | 2 | 2 | 237.865.000 | 2 | 261.651.500 | 1 | 287.816.650 | 1 | 316.598.315 | 1 | 348.258.147 | 9 | | | | | Bidang Aset |
| | | | Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah | % SKPD yang menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah | 0 | 70% | 163.407.700 | 80 | 279.600.000 | 100 | 307.560.000 | 100 | 144.000.000 | 100 | 158.400.000 | 100 | | | | | Bidang Aset |
| | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang yang dievaluasi | 0 | 2 | 70.800.000 | | | | | | | | | | | | | | Bidang Aset |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | |
|--------|---------|------|--|---|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------|----|--|--------|-------------|
| | | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Target | Rp | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks kepuasan masyarakat /aparatur terhadap layanan pengelolaan keuangan | 77,25 | 77,50 | | 78,00 | | 78,50 | | 79,00 | | 79,50 | | 79,50 | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah layanan surat masuk dan keluar yang ditindaklanjuti | | 100 | 15.144.000 | 100 | 16.658.400 | 100 | 18.324.240 | 100 | 20.156.664 | 100 | 22.172.330 | 100 | | | | Sekretariat |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran listrik, air, telepon, tv kabel | 12 | 12 | 2.952.000.000 | 12 | 3.247.200.000 | 12 | 3.571.920.000 | 12 | 3.929.112.000 | 12 | 4.322.023.200 | 12 | | | | Sekretariat |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | % realisasi penyerapan anggaran SKPD | 77,24% | 80% | 1.580.243.800 | 82% | 1.738.268.180 | 84% | 1.912.000.000 | 90% | 2.103.200.000 | 90% | 2.313.520.000 | | | | | Sekretariat |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pemeliharaan kebersihan gedung perkantoran terpadu | 12 | 12 | 784.376.400 | 12 | 862.814.000 | 12 | 949.095.400 | 12 | 1.044.044.000 | 12 | 1.148.448.400 | 12 | | | | Sekretariat |
| | | | Penyediaan Alat tulis kantor | Jenis alat tulis kantor untuk mendukung operasional perkantoran | | | 123.019.100 | | 135.321.000 | | 148.853.100 | | 163.700.000 | | 180.070.000 | | | | | Sekretariat |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis barang cetakan untuk mendukung operasional perkantoran | | | 92.943.800 | | 102.238.180 | | 112.461.000 | | 123.707.100 | | 136.000.000 | | | | | Sekretariat |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik untuk perawatan gedung perkantoran terpadu | | | 1.103.942.050 | | 1.214.336.000 | | 1.335.769.600 | | 1.469.346.560 | | 1.616.281.000 | | | | | Sekretariat |
| | | | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jenis surat kabar harian di SKPD | 3 | 3 | 14.812.920 | 3 | 16.290.000 | 3 | 17.919.000 | 3 | 19.710.900 | 3 | 21.681.990 | 3 | | | | Sekretariat |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis penyediaan bahan logistik untuk pegawai | | | 57.618.300 | | 63.380.000 | | 69.718.000 | | 76.689.800 | | 84.358.780 | | | | | Sekretariat |
| | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah acara undangan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri | | | 99.774.000 | | 109.751.400 | | 120.726.000 | | 132.798.600 | | 146.078.460 | | | | | Sekretariat |
| | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah acara undangan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri | | | 10.500.000 | | 11.550.000 | | 12.705.000 | | 13.975.500 | | 15.373.050 | | | | | Sekretariat |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase aset dalam kondisi baik | 75% | 75% | | 80% | | 85% | | 90% | | 95% | | 95% | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengadaan Kendaraan dinas jabatan | 3 | 7 | 3.900.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor | 0 | 2 | 193.216.000 | 8 unit | 96.000.000 | 6 unit | 87.000.000 | 6 unit | 68.000.000 | 6 unit | 63.000.000 | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | % Aset bangunan dalam kondisi baik | 12 | 12 | 1.425.806.500 | 12 | 1.568.387.150 | 12 | 1.725.225.000 | 12 | 1.897.747.500 | 12 | 2.087.522.250 | 12 | | | | Sekretariat |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Oparasional | Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional dalam kondisi baik | 90% | 90% | 577.682.100 | 95% | 635.450.000 | 98% | 698.995.000 | 98% | 768.894.500 | 98% | 845.783.950 | 98% | | | | Sekretariat |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | % peralatan kantor dalam kondisi baik | 75% | 80% | 96.306.000 | 85% | 105.936.600 | 85% | 116.530.000 | 95% | 128.183.000 | 95% | 141.001.300 | 95% | | | | Sekretariat |
| | | | Pelayanan Operasional Gedung Perkantoran terpadu | Jumlah tenaga harian lepas gedung perkantoran terpadu yang dibayarkan honorariumnya | 118 | 124 | 3.553.615.860 | 124 | 3.908.977.000 | 124 | 4.299.874.700 | 124 | 4.729.862.000 | 124 | 5.202.848.200 | 124 | | | | Sekretariat |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | % ASN yang menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas | 0 | 2000 | 1.500.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya | 80% | 83% | | 85% | | 87% | | 89% | | 90% | | 90% | | | | Sekretariat |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi | 90 | 6 | 74.200.000 | 6 | 81.620.000 | 6 | 89.782.000 | 6 | 98.760.200 | 6 | 108.636.220 | 120 | | | | Sekretariat |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|--------|--|------|---|--|---|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------|----|---|--------|--|
| | | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Target | Rp | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | Prosentase peningkatan PAD dari sektor pajak | 3,70% | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | | | | | |
| | Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah | | | % realisasi penerimaan pajak daerah | 107,29% | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | |
| | | | Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah | % realisasi penerimaan pajak daerah | 107,29% | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan |
| | | | Optimalisasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah | % penurunan piutang pajak daerah | 6% | 5% | 387.245.600 | 5% | 425.970.000 | 5% | 468.567.000 | 5% | 515.423.700 | 5% | 566.966.000 | 25% | | | | Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan |
| | | | Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Realisasi Pajak daerah Yang valid | 1 | 1 | 479.195.000 | 1 | 527.114.500 | 1 | 279.800.000 | 1 | 283.000.000 | 1 | 295.000.000 | 1 | | | | Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan |
| | | | Peningkatan Kepatuhan Perpajakan | % WP yang membayar pajak tepat waktu | 90% | 92% | 85.594.000 | 94% | 94.153.400 | 96% | 103.568.000 | 98% | 113.924.800 | 98% | 125.317.000 | 98% | | | | Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | |
|--------|---------|------|---|--|---|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|----|---|---------------------------------|--|
| | | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Target | Rp | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah | % data wajib pajak daerah yang tervalidasi | 10% | 15% | | 35% | | 55% | | 75% | | 95% | | 95% | | | Bidang Pendapatan dan Penetapan | |
| | | | Verifikasi Data Pajak Daerah | % obyek pajak yang terverifikasi | 15% | 20% | 124.543.000 | 40% | 136.997.300 | 60% | 150.697.030 | 80% | 165.766.733 | 95% | 182.343.406 | 95% | | | Bidang Pendapatan dan Penetapan | |
| | | | Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah | % WP yang melaporkan pajaknya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku | 80 | 80 | 51.609.000 | 85 | 56.769.900 | 85 | 62.446.890 | 90 | 68.691.579 | 90 | 75.560.737 | 90 | | | Bidang Pendapatan dan Penetapan | |
| | | | Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah | Jumlah sistem informasi pajak yang dipelihara | 1 | 1 | 284.491.000 | 1 | 312.940.100 | 1 | 344.234.110 | 1 | 378.657.521 | 1 | 416.523.273 | 1 | | | Bidang Pendapatan dan Penetapan | |
| | | | Cetak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB P2 | % SPPT PBB yang tercetak dan terdistribusi | 73,33% | 80% | 266.545.000 | 85% | 293.199.500 | 98% | 322.519.450 | 98% | 354.771.395 | 98% | 390.248.535 | 98% | | | Bidang Pendapatan dan Penetapan | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah | % NIOP yang tidak terbayar atau kembali ke loket pelayanan | 25 | 25 | 145.689.900 | 25 | 160.258.890 | 25 | 176.284.779 | 20 | 193.913.257 | 15 | 213.304.583 | 10 | | | Bidang Pendapatan dan Penetapan | |
| | | | Pemetaan Potensi Pajak Daerah | Jumlah Database potensi pajak | 9 | 9 | 139.580.000 | 9 | 153.538.000 | 9 | 168.891.800 | 9 | 185.780.980 | 9 | 204.359.078 | 9 | | | Bidang Pendapatan dan Penetapan | |
| | | | JUMLAH | | | | 25.611.092.148 | | 22.231.615.660 | | 23.961.422.326 | | 25.836.471.051 | | 28.150.176.834 | | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD) pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022. Untuk itu dalam penyusunan harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu sehingga dapat dicapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, dan tujuan serta sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2022. Adapun indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| NO | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun Indikator | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|-------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Indikator kinerja tujuan Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada RPJMD Kota Batu 2018 – 2022 adalah Opini BPK, dimana tahun dasar periode RPJMD yaitu tahun 2017 dengan kondisi awal opini BPK WTP. Adapun target indikator kinerja

tujuan untuk 5 (lima) tahun menatang adalah mempertahankan predikat WTP atas Opini BPK erhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

| NO. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|--|--|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel | | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah | Persentase OPD yang menyusun Laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu | 80% | 90% | 95% | 98% | 98% |
| | | Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah | Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |

Sasaran Pertama yaitu Meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan daerah dengan indikator kinerja persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan dengan benar dan tepat waktu. Capaian indikator kinerja sasaran pada tahun dasar yaitu tahun 2017 adalah sebesar 70%. Target indikator kinerja sasaran pertama pada tahun pertama adalah sebesar 80%, kemudian meningkat menjadi 90% di tahun kedua dan 95% di tahun ketiga. Untuk tahun keempat dan kelima ditetapkan target sebesar 98%.

Sasaran Kedua yaitu meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah dengan indikator persentase peningkatan PAD dari sektor pajak. Pada tahun dasar indikator ini berada di angka 3,5%. Untuk tahun selanjutnya indikator sasaran kedua ditargetkan sebesar 3,5% setiap tahun.

BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kota Batu adalah merupakan program Kota, sedangkan fungsi dibuatnya renstra perangkat daerah Badan Keuangan Daerah adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Tujuan penyusunan renstra perangkat daerah Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018-2022 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pemabngunan yang memberikan arahan atau strategi pebangunan, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan.

Dengan disusunnya renstra Badan keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan renja perangkat daerah dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, perubahan rencana kerja anggaran;
3. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan.

Batu, Juli 2018

**KEPALA
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Drs. ZADIM EFFISIENSI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670404 198602 1 003

BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kota Batu adalah merupakan program Kota, sedangkan fungsi dibuatnya renstra perangkat daerah Badan Keuangan Daerah adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Tujuan penyusunan renstra perangkat daerah Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018-2022 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pemabngunan yang memberikan arahan atau strategi pebangunan, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan.

Dengan disusunnya renstra Badan keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan renja perangkat daerah dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, perubahan rencana kerja anggaran;
3. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan.

Batu, Juli 2018


**KEPALA
BADAN KEUANGAN DAERAH**
Drs. ZADIM EFFISIENSI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670404 198602 1 003